

ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Sony Kristiyanto

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl Dukuh Kupang XXV No 54 Surabaya
e-mail: sonykristiyanto@yahoo.com

Abstract

Every country in this world must be facing poverty problem in their economic. There are many ways to reduce poverty problems in each country. One of them is using fiscal policies through government expenditure. In Indonesia's fiscal policies, there are two types of government expenditure. They are: direct government expenditure and indirect expenditure. This paper study about how both of government expenditure will effect the reduce of poverty in East Java Province. The research is coming into conclusion that both of government expenditure will effect poverty in East Java Province, but in the different way. Direct government expenditure will reduce poverty if the government increase this expenditure. In contrary, indirect government expenditure will raise poverty when it is increasing.

Key words: *Poverty, Direct Government Expenditure, Indirect Government Expenditure, East Java Province*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia yang diwarnai dengan berbagai macam krisis dan gejala baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, mau tidak mau pasti akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di Indonesia. Krisis ekonomi hampir bisa dipastikan akan membuat angka rumah tangga miskin di Indonesia akan meningkat. Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia sendiri meningkat pada waktu Indonesia menghadapi krisis finansial asia yang terjadi dalam rentang waktu 1997 hingga tahun 1998. Data yang di keluarkan oleh World Bank, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia juga mengakibatkan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa. Pergeseran ini ternyata menimbulkan berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia dari 24 persen di tahun 1999 menjadi 11,5 persen di tahun

2013. Namun tingkat penurunan kemiskinan mulai melambat pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kondisi ini sama juga ditemukan oleh Irfan Mohammad dalam penelitiannya di Pakistan. Dalam kesimpulannya, Irfan mengemukakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan salah satu caranya adalah dengan menggeser bidang pekerjaan, dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Pada tingkat pemerintahan provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengentaskan rumah tangga miskin tersebut dari jebakan kemiskinan yang bersifat budaya miskin itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah umumnya terbagi menjadi dua hal besar, yaitu yang upaya yang bersifat *rescue* atau penyelamatan jangka pendek yang ditujukan untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk ke dalam lilitan kemiskinan hingga upaya yang bersifat *recovery* atau upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memberikan hasil yang cukup baik. Tahun 2005 terdapat 22,51 persen penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, dan angka ini menurun pada tahun 2006 menjadi 19,89 persen. Tidak berhenti sampai di tahun 2006 saja, penurunan angka kemiskinan juga terus berlangsung pada tahun – tahun berikutnya. Tahun 2007 angka kemiskinan tercatat pada 18,89 persen, tahun 2008 menjadi 18,51 persen. Dilihat dari topografi kemiskinan, jumlah rumah tangga miskin masih banyak terjadi di daerah apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin di wilayah perkotaan (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019).

Adanya kenyataan bahwa rumah tangga miskin lebih banyak terjadi di daerah, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peranan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota menjadi sangat krusial. Pemerintah kabupaten kota, dengan kewenangannya pada penyusunan, alokasi dan penggunaan anggaran belanja daerah memegang peranan untuk menciptakan program – program yang mampu menurunkan jumlah rumah tangga miskin tersebut. Kreatifitas pemerintah daerah dalam membuat program yang bisa menyentuh langsung masyarakat dan akhirnya bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang menjadi tujuan akhir.

Program – program yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut pasti akan membutuhkan anggaran belanja yang tidak sedikit. Secara umum, belanja pemerintah sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penanganan masalah kemiskinan dengan menjalankan berbagai macam program dari pemerintah kabupaten kota, masuk dalam kategori belanja langsung. Sedangkan

belanja tidak langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur terhadap pengentasan kemiskinan.

Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi referensi tambahan baik bagi akademisi yang tertarik dalam bidang pengentasan kemiskinan dengan menggunakan instrumen ekonomi fiskal maupun bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan mengenai pengentasan kemiskinan.

TELAAH PUSTAKA

Kemiskinan dan Pengukuran Kemiskinan

Dalam perspektif yang sederhana, kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidak mampuan dari seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang umumnya merupakan kebutuhan fisik (Haughton, 2009). Kebutuhan dasar itu sendiri, apabila dipersempit adalah kebutuhan yang bersifat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan untuk makanan, pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.

Beberapa negara kemudian memperlebar definisi dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dipahami tidak sebatas ketidak mampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik semata tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Jika dalam perspektif sempit, kebutuhan seseorang hanya dipatok pada pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan sandang,

maka apabila diperluas, kebutuhan seseorang akan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sanitasi, pertanahan, sumber daya alam lingkungan, rasa aman, partisipasi dalam sosial politik dan kesetaraan gender.

Perluasan arti kemiskinan sendiri berangkat dari pemahaman bahwa kemiskinan adalah suatu hal yang bersifat multidimensional. Kemiskinan yang melilit masyarakat lebih bersifat struktural daripada bersifat individual. Masyarakat menjadi miskin bukan karena masyarakat tersebut malas bekerja, namun masyarakat terbelenggu oleh struktur sosial yang menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses sumber – sumber penghasilan.

Seseorang dikatakan miskin atau tidak akan berbeda antar satu negara dengan negara lain. Indonesia sendiri menganut kebijakan bahwa seseorang dikatakan di bawah garis kemiskinan apabila yang bersangkutan memiliki penghasilan per bulan di bawah Rp 233.470 per bulan, atau apabila seseorang memiliki pendapatan kurang dari Rp 7.782 per harinya. Selain penduduk miskin, pemerintah mendefinisikan juga penduduk hampir miskin. Penduduk hampir miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan antara Rp 233.470 sampai Rp 280.488 per bulan. Kemudian dikelompokkan juga kategori penduduk hampir tidak miskin, yaitu mereka yang mempunyai pendapatan antara Rp 280.488 hingga Rp 350.160. melihat penggolongan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, maka secara otomatis mereka yang mempunyai pendapatan di atas Rp 350.160 dikategorikan penduduk mampu atau penduduk tidak miskin.

Pengukuran lain kemiskinan yang dilakukan Indonesia melalui metode Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri adalah jumlah minimal rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Rumus penghitungan Garis kemiskinan adalah:

$$GK = GKM + GKNM \dots \dots \dots (1)$$

Dimana,

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

Garis Kemiskinan Makanan disetarakan dengan 2100 Kilo Kalori per kapita per hari. Jumlah kalori sebesar 2100 kilo kalori tersebut dianggap adalah nilai minimal yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bekerja secara normal untuk mendapatkan penghasilan. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan adalah pengeluaran yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain kebutuhan makanan. Kebutuhan yang dimaksud antara lain adalah kebutuhan untuk pakaian dan kebutuhan tempat tinggal.

Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2007 menegaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No 59 Tahun 2007 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Studi Empiris

Mengambil lokasi penelitian di Papua tahun 2006, Erlangga Agustino Landiyanto sampai pada kesimpulan, bahwa untuk menanggulangi masalah kemiskinan di provinsi tersebut, salah satu yang disarankan adalah dengan lebih memberdayakan lembaga keuangan mikro. Kesimpulan ini diambil salah satunya dengan melihat fakta bahwa lembaga keuangan baik itu perbankan atau lembaga keuangan non bank formal masih sangat sedikit yang membuka cabang hingga ke Papua.

Quentin Wodon (2007) dalam tulisannya yang berjudul *Growth and Poverty Reduction in West Africa* sampai pada kesimpulan bahwa di beberapa negara Afrika seperti Ghana dan Senegal, pertumbuhan ekonomi mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut. Walaupun pertumbuhan ekonomi mampu untuk mengurangi kemiskinan di kedua negara tersebut, namun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Masih dari penelitian yang sama,

beberapa negara ternyata tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinannya. Burkina Faso adalah salah satu contoh negara yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Irfan Mohammad dan Rashid Amjad tahun 1994 melakukan penelitian di Pakistan. Penelitian mereka yang berjudul: *Poverty in Rural Pakistan*, sampai pada kesimpulan bahwa penanganan kemiskinan di Pakistan salah satunya dengan menggeser sektor pekerja. Pekerja yang berpindah dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) mampu untuk mengangkat tingkat pendapatan yang berujung pada pengurangan tingkat kemiskinan secara agregat di negara tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian ini mengangkat variabel yang bersifat instrumen fiskal. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengedepankan bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Hipotesis

Merujuk pada telaah teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur secara bersama – sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin
2. Belanja langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin
3. Belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rumah tangga miskin

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Mengingat jumlah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 kabupaten dan kota, maka penulis mengambil seluruh kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Keputusan ini diambil mengingat ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif minimal harus 30 pengamatan. Kabupaten dan kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Kab Bangkalan, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Gresik, Kab Jember, Kab Jombang, Kab Kediri, Kab Lamongan, Kab Lumajang, Kab

Madiun, Kab Magetan, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab Nganjuk, Kab Ngawi, Kab Pacitan, Kab Pamekasan, Kab Pasuruan, Kab Ponorogo, Kab Probolinggo, Kab Sampang, Kab Sidoarjo, Kab Situbondo, Kab Sumenep, Kab Trenggalek, Kab Tuban, Kab Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat runtun waktu atau *cross section*. Penelitian ini mengambil tahun 2013 sebagai periode pengamatan.

Definisi Operasional Variabel

Untuk menyamakan persepsi, maka berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*). Kemiskinan ini juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2. Belanja Langsung (X1)

Belanja langsung adalah belanja yang langsung digunakan untuk program – program yang akan dilakukan oleh pemerintah dan langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak.

3. Belanja Tidak Langsung (X2)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan.

Teknik Analisis

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Secara umum, regresi linear berganda dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS) yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari model sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

Y_i: Angka rumah tangga miskin di 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur 2013

X₁: Belanja langsung pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013

X₂: Belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota Provinsi Jawa Timur 2013

i: Kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur

α : Konstanta

β_1, β_2 : Parameter

ε : Error terms

Uji Parameter dan Uji Statistik

Setelah memperoleh hasil regresi sesuai dengan model (2), maka langkah selanjutnya menguji model tersebut untuk mendapatkan hasil yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*). Uji parameter yang dilakukan dalam penelitian ini lazim disebut dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas fungsi. Sedangkan untuk uji statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis partial (uji t), uji hipotesis serentak (uji f) dan uji koefisien determinasi (uji R^2). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 95 persen atau mengambil *margin error* sebesar 5 persen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Dengan menggunakan bantuan software eviews 6, hasil estimasi terhadap persamaan (2) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Model Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.357445	27.71251	0.085068	0.9327
X1	-5.31E-05	2.52E-05	-2.104903	0.0425
X2	0.000183	3.97E-05	4.617592	0.0001
R-squared	0.407926	Mean dependent var		128.7632
Adjusted R-squared	0.374094	S.D. dependent var		77.83643
S.E. of regression	61.57971	Akaike info criterion		11.15420
Sum squared resid	132722.1	Schwarz criterion		11.28348
Log likelihood	-208.9298	Hannan-Quinn criter.		11.20020
F-statistic	12.05714	Durbin-Watson stat		2.027072
Prob(F-statistic)	0.000104			

Sumber: data, diolah

Sebelum dilakukan uji hipotesis atas pemodelan yang dibangun, akan dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dari pemdoelan yang coba dibangun adalah sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel bebas dalam model yang dibangun. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi antar variabel. Suatu model dikatakan memiliki masalah multikolinearitas ketika terdapat hubungan korelasi lebih daro 0,8 dan hal tersebut terjadi pada saat R2 lebih dari 90 persen (Winarno, 2007). Hasil uji korelasi antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan yang dibangun bebas dari permasalahan multikolinearitas sebagaimana terlihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Korelasi Antar Variabel

	X1	X2	Y
X1	1.000000	0.710493	0.217330
X2	0.710493	1.000000	0.577041
Y	0.217330	0.577041	1.000000

Sumber: data, diolah

Uji Autokorelasi

Pemodelan menggunakan analisa regresi sederhana harus terbebas dari adanya korelasi antara variabel pengganggu pada satu periode dengan periode waktu sebelumnya. Apabila suatu model ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu, maka pemodelan tersebut dikatakan terkena permasalahan autokorelasi (Winarno, 2007). Penelitian ini menggunakan pemodelan yang dikembangkan oleh Breusch – Godfrey untuk melihat adakah permasalahan autokorelasi atau tidak dalam pemodelan. Hasil uji Breusch – Godfrey untuk penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan yang dibangun tidak terindikasi masalah autokorelasi, yang ditunjukkan dengan tidak signifikannya F statistik dalam uji Breusch – Godfrey.

Uji Heteroskedastisitas

Pemodelan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat *cross section* atau data yang diruntun berdasar ruang. Pemodelan dengan menggunakan data *cross section* sangat rentan dengan permasalahan heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas sendiri diartikan sebagai kondisi dimana suatu model dengan pendekatan OLS yang mempunyai varian yang tidak konstan atau mempunyai residual yang tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi yang lain (Widarjono, 2005). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Hasil uji White dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak terkena masalah heteroskedastisitas yang diketahui dari tidak signifikannya F statistik dalam uji White.

Uji Linearitas Fungsi

Linear dalam regresi linear berganda mengandung arti bahwa model harus *linear in parametric*. Untuk memastikan apakah model yang dibangun telah linear atau belum, digunakan Ramsey Reset Test. Suatu model dikatakan telah linear apabila dalam Ramsey Reset Test tidak signifikan secara statistik. Hasil uji Ramsey Reset Test dalam penelitian ini menunjukkan nilai F statistik yang tidak signifikan secara statistik, maka bisa diambil kesimpulan bahwa model yang coba dibangun telah linear secara statistik.

Uji Normalitas

Menggunakan Jarque – Bera Test untuk mendeteksi masalah apakah data sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Dengan melihat nilai probabilitas Jarque Bera dan membandingkannya dengan nilai signifikansi yang diambil, maka bisa diputuskan apakah model tersebut sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai probabilitas yang didapat dalam uji Jarque Bera penelitian ini adalah 0,299 yang berarti lebih tinggi dari nilai margin error 0,05 yang berarti bahwa model yang dibangun telah terdistribusi secara normal.

Uji Statistika

Uji statistik atau yang lebih dikenal juga dengan uji hipotesis. Terdapat dua macam uji hipotesis, yaitu uji hipotesis parsial (uji t) dan uji hipotesis serentak (uji f). Uji t dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung. Apabila didapat nilai mutlak t tabel kurang dari t hitung, maka variabel tersebut dikatakan signifikan secara statistik. Selain itu, uji t bisa juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas suatu variabel lebih kecil dari nilai *margin error* yang ditentukan, maka variabel tersebut dikatakan signifikan secara statistik. Aturan yang sama juga berlaku untuk uji f atau uji hipotesis serentak.

Melihat kembali tabel 1, maka bisa diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel belanja langsung sebesar -2,10 dan untuk variabel belanja tidak langsung sebesar 4,617. Nilai t tabel untuk df sebesar 35 dan tingkat kesalahan sebesar 5

persen adalah 1,6905. Dari hasil tersebut maka bisa disimpulkan bahwa belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh secara individual terhadap kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

Signifikansi serentak atau uji f dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa belanja langsung dan variabel belanja tidak langsung secara bersama – sama mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini bisa dilihat dari nilai probabilitas F sebesar 0,000104 yang lebih kecil dari nilai *margin error* sebesar 0,05.

Selain uji t dan uji f, dalam uji statistika, terdapat juga uji koefisien determinasi atau yang biasa disebut dengan uji R^2 . Besaran R^2 pasti diantara nol dan satu serta selalu bernilai positif. Penelitian ini menghasilkan nilai R^2 sebesar 37,40 persen, yang berarti bahwa 37,40 persen fluktuasi angka kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur mampu dijelaskan oleh variasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Sisanya, sebesar 62,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Merujuk pada tabel 1, maka persamaan (2), secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 2,35 - 0,000053X_1 + 0,00018X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (3)$$

Secara verbal, persamaan (3) dapat dijabarkan sebagaimana berikut: apabila terjadi kenaikan pada belanja langsung sebesar satu satuan (berarti seratus juta rupiah) akan menurunkan angka rumah tangga miskin sebesar 0,000053 dengan asumsi semua variabel lain dalam kondisi konstan. Sedangkan, apabila terjadi kenaikan pada belanja tidak langsung sebesar seratus juta rupiah maka akan ikut menaikkan angka rumah tangga miskin sebesar 0,00018 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Signifikannya variabel belanja langsung dengan parameter negatif sebenarnya telah diduga sebelumnya. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat tentu akan sangat membawa dampak secara langsung pula oleh masyarakat. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan belanja program seperti belanja subsidi di berbagai sektor seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan tentu akan mengurangi beban rumah tangga miskin. Layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan antara lain dengan memberikan pendidikan gratis hingga jenjang pendidikan menengah, memberikan bantuan atau beasiswa bagi siswa yang memiliki prestasi akademik hingga membangun sekolah yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat.

Pengurangan rumah tangga miskin dengan memperbesar belanja langsung telah dilakukan di beberapa kota dalam bentuk subsidi langsung. Beberapa kota yang dapat dijadikan contoh adalah Kota Blitar. Kota ini mampu memberikan subsidi sebesar satu juta rupiah untuk tiap warganya yang mampu untuk melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan tinggi negeri. Kota Blitar juga menggratiskan pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah dan memberikan seragam, sepatu dan kaos kaki gratis kepada seluruh peserta didik.

Inti dari layanan cuma – cuma yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota adalah untuk meringankan beban rakyat, terutama beban rumah tangga miskin. Layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah ini juga bertujuan untuk mengentaskan rumah tangga miskin menjadi lebih baik. Dengan layanan gratis terutama pada layanan publik, diharapkan pula rumah tangga miskin mampu menikmati layanan dasar yang dibutuhkan walaupun pada umumnya layanan dasar tersebut dalam kondisi minimal.

Hal yang cukup menarik dalam penelitian ini adalah variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan. Kondisi ini artinya, setiap penambahan pada belanja tidak langsung akan diikuti pula oleh penambahan rumah tangga miskin. Cukup mengejutkan mengingat salah satu tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang salah satu indikatornya adalah jumlah rumah tangga miskin. Namun, apabila merujuk kembali pada teori yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini bahwa belanja tidak langsung lebih ditujukan untuk operasional pemerintahan, maka kondisi ini tidak mengherankan. Peningkatan belanja tidak langsung tidak akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Apabila terjadi kenaikan belanja tidak langsung, maka yang pertama kali menikmati adalah pegawai negeri sipil yang hampir bisa dipastikan bukan merupakan rumah tangga miskin.

Belanja tidak langsung pemerintah mungkin akan turut menurunkan jumlah rumah tangga miskin apabila *trickle down effect* terjadi di suatu wilayah terjadi. Teori ini menitik beratkan pada pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pendapatan berlebih kepada kelompok yang mengalami kekurangan pendatan. Bila dikaitkan dengan belanja tidak langsung, maka seharusnya mereka yang mendapatkan pendapatan berlebih dari kenaikan belanja tidak langsung ini mampu untuk mencicipakan pendapatan tambahan bagi kelompok yang mengalami kekurangan pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Belanja langsung pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin. Belanja tidak langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah, yang berarti apabila belanja tidak langsung mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan jumlah rumah tangga miskin. Belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur juga mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin. Namun, apabila belanja langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah, belanja tidak langsung mempunyai hubungan yang searah. Maka, apabila pemerintah menambah jumlah belanja tidak langsung, maka akan menambah pula jumlah rumah tangga miskin.

Saran

Baik belanja langsung maupun tidak langsung mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Keadaan ini artinya pemerintah kabupaten kota diharapkan bisa memainkan anggaran belanja tersebut untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin. Hal yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa pemerintah harusnya memperbesar belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena memang belanja langsung inilah yang langsung berhubungan dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2015. *Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra OPD/Biro Tahun 2014 – 2019*. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Haughton, Jonathan & Shahidur R Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC: The World Bank
- Mohammad, Irfan & Rashid Amjad. 1994. *Poverty in Rural Pakistan*, *Pakistan Institute of Development Economics Islamabad*. http://mpr.ub.uni-muenchen.de/38335/1/MPRA_paper_38335.pdf, diunduh pada 8 Agustus 2015
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2006. *Alternative Strategy Poverty in Papua*. http://mpr.ub.uni-muenchen.de/4391/1/MPRA_paper_4391.pdf diunduh pada 8 Agustus 2015

- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Winarno, W.W 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Wodon, Quentin. 2007. *Growth and Poverty Reduction in West Africa: A Brief Overview*. World Bank. http://mpr.ub.uni-muenchen.de/11086/1/MPRA_paper_11086.pdf diunduh pada 8 Agustus 2015
- World Bank. 2015. <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>. diunduh pada 8 Agustus 2015.